

**TINJAUAN YURIDIS KEGENTINGAN YANG MEMAKSA SEBAGAI
DASAR PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA OLEH PRESIDEN**

SKRIPSI

LA ODE MUHAMAD AGUS

193300516204



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

JAKARTA

2024

**JURIDICAL REVIEW OF FORCING URGENCY AS A BASIS FOR
DETERMINING PERPU NUMBER 2 OF 2002 CONCERNING JOB
CREATION BY THE PRESIDENT**

La Ode Muhamad Agus

193300516204

*This thesis was submitted as one of the conditions to obtain a bachelors degree
of Law*



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

JAKARTA

2024

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : La Ode Muhamad Agus
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516204
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS KEGENTINGAN YANG
MEMAKSA SEBAGAI DASAR PENETAPAN
PERPPU NO 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA
KERJA OLEH PRESIDEN**

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari tim penguji dalam sidang ujian Skripsi pada tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana tertulis dalam berita acara ujian skripsi

Jakarta, 7 Maret 2024

Pembimbing,

(Dr. Hamrin S.H., M.H., MSi (han))

Tim Penguji

Ketua

(Dr. Mustakim, S.H., MH)

Anggota

(Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D)

Anggota

(Dr. Hamrin, SH., M.Si (han))

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS KEAGENTINGAN YANG MEMAKSA SEBAGAI DASAR PENETAPAN PERPPU NO 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA OLEH PRESIDEN**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 29 Februari 2024 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A-** dan predikat sangat memuaskan.

Jakarta, 7 Maret 2024

Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si.

Pembimbing



Dr. Hamrin S.H., M.H., MSi(han)

Tim Penguji,

Ketua



(Dr. Mustakim, S.H., MH)

Anggota



(Dr. Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D)

Anggota



(Dr. Hamrin, SH., M.Si(han))



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : La Ode Muhamad Agus
Tempat/ tanggal lahir : Kab. Muna 12 Mei 2002
Nomor induk mahasiswa : 193300516204
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Nasional
Alamat : Jl. Rajawali NO.7/RT.7/RW.1,Jakarta Selatan
Nomor *Handphone* :082259651122

Menyatakan yang sebenarnya bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEGENTINGAN YANG MEMAKSA SEBAGAI DASAR PENETAPAN PERPPU NO 2 TAHUN 2022 OLEH PRESIDEN”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah di publikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam Skripsi ini dilakukan melalui studi kepustakaan adalah orinisil kecuali kutipan yang saya masukan dengan menggunakan catatan kaki.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jakarta, 26 Februari 2024



La Ode Muamad Agus

ABSTRAK

PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

SKRIPSI FEBRUARI 2024

A. Nama Penulis : La Ode Muhamad Agus

B. Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516204

C. Judul Skripsi :
**TINJAUAN YURIDIS
KEGENTINGAN YANG MEMAKSA
SEBAGAI DASAR PENETAPAN
PERPPU NO 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA OLEH
PRESIDEN**

D. Jumlah Halaman : Halaman pengantar xii dan halaman isi 91

E. Isi Abstrak : Perppu diatur undang-undang, maka sejajar dengan undang-undang. Namun karena belum adanya peraturan perundang-undangan, hal tersebut terpaksa diatur dengan peraturan pemerintah karena adanya urgensi yang mendesak. Perppu, yang merupakan salah satu undang-undang diharapkan dapat dipahami secara menyeluruh. Perlu diingat bahwa dalam keadaan tertentu, khususnya dalam hal-hal yang bersifat mendesak, Presiden harus tetap waspada dan mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pasal 22 UUD 1945 mengatur adanya situasi kritis yang mengharuskan penggunaan cara-cara yang berbeda dari biasanya untuk menyelesaikan krisis tersebut. UUD 1945 tidak menguraikan "Urgensi Mewajibkan". Penjelasan Pasal 22 berkaitan dengan noodverordeningsrecht Presiden. Peraturan seperti ini sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat menjamin keselamatan negara dalam keadaan yang mengerikan dan terpaksa merespons secara efisien dan bertanggung jawab. Meski demikian, pengawasan DPR akan terus meluas ke pemerintah. Oleh karena itu, pada rapat mendatang, DPR juga wajib menyetujui peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut yang mempunyai kekuatan sama dengan peraturan.

Kata Kunci: Perppu, Presiden, ideal.

F. Daftar Pustaka : 45 Buku, 8 Peraturan undang-undangan,
14 Jurnal, 9 Internet.

G. Nama Dosen Pembimbing : Dr. Hamrin, S.H.,M.H.,M.Si (Han)

ABSTRACT

DEGREE PROGRAM OF NATIONAL UNIVERSITY LEGAL SCIENE STUDY PROGRAM THESIS, FEBRUARI 2024

A. Writer's Name : La Ode Muhamad Agus

B. Student Identification Number : 193300516204

C. Thesis Title :

**JURIDICAL REVIEW OF FORCING
URGENCY AS A BASIS FOR
DETERMINING PERPPU NO 2 OF
2022 CONCERNING JOB CREATION
BY THE PRESIDENT**

D. Number Of Page : Introductory page xii and contents page 91

E. Abstrak Content : Perppu is regulated by law, so it is parallel to the law. However, because there are no statutory regulations, this matter has to be regulated by government regulations due to the urgent need. It is hoped that the Perppu, which is one of the laws, can be understood thoroughly. It should be remembered that in certain circumstances, especially in urgent matters, the President must remain vigilant and take firm action to resolve the problem.

Article 22 of the 1945 Constitution regulates the existence of a critical situation that requires the use of different methods than usual to resolve the crisis. The 1945 Constitution does not describe "Mandatory Urgency". Elucidation of Article 22 relates to the President's noodverordeningsrecht. Regulations like this are urgently needed so that the government can ensure the safety of the country in dire circumstances and is forced to respond efficiently and responsibly. However, the DPR's supervision will continue to extend to the government. Therefore, at the next meeting, the DPR is also obliged to approve government regulations as regulated in this Article which have the same force as regulations.

Keywords: *Perppu, President, ideal.*

F. Reference : 45 Books, 8 laws, 14 Journal, 9Website.

G. Name of Supervisor : Dr. Hamrin, S.H.,M.H.,M.Si (Han)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul” **TINJAUAN YURIDIS KEGENTINGAN YANG MEMAKSA SEBAGAI DASAR PENETAPAN PERPPU NO 2 TAHUN 2024 OLEH PRESIDEN**”

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua beserta seluruh keluarga yang telah membesarkan dengan penuh cinta, dan kasih sayang, memberikan doa, motivasi, semangat, dukungan dan perjuangan hingga penulis mencapai perguruan tinggi.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Masidin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Nasional.

5. Dr. Hamrin, S.H., M.H., M.Si (Han). selaku Dosen Pembimbing yang ditengah-tengah kesibukannya masih sempat membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membimbing penulis secara akademik dan nasihatnya selama tiga setengah tahun masa perkuliahan.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional yang sudah banyak memberikan bantuan secara teknis selama menempuh perkuliahan.
8. Seluruh teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional, khususnya Angkatan 2019 yang selama tiga setengah tahun Bersama merasakan pahit-manis yang ada di Fakultas Hukum. Ucapan terima kasih ini juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu. Penulis hanya bisa mendoakan semoga jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan balasan yang setimpal.



Jakarta 26 Februari 2024

La Ode Muhamad Agus

DAFTAR ISI

COVER	i
TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan	12
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	13
E. Metode Penelitian.....	25
F. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II.....	31
TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Pengertian Lembaga Negara	31
B. Lembaga Negara Dalam Konsep Trias Politika	37
C. Lembaga Negara Dalam UUD 1945	43
BAB III.....	51
OBYEK PENELITIAN.....	51
A. Peraturan Perundang-Undangan.....	51
B. Definisi dan Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu).....	56
C. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang	58
D. Prosedur untuk Menghasilkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang.....	59
E. Cara Penggunaan Peraturan Pemerintah Sebagai Undang - Undang di Indonesia.....	63
BAB IV	66
ANALISI YURIDIS TENTANG KEAGENTINGAN MEMAKSA SEBAGAI DASAR PENETAPAN PERPPU NO 2 TAHUN 2022 OLEH PRESIDEN.....	66

A. Pengaturan Kegentingan Yang Memaksa Menurut Hukum Tata Negara Indonesia.....	66
B. Konsep Ideal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Dasar Dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2022 Oleh Presiden	73
BAB V.....	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

